



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN  
2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN  
ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya bencana alam di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 yang menyebabkan terjadinya keadaan darurat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan dimaksud;

b. bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 825);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah  
Kota Palu Tahun 2017 Nomor

9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor  
9);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2018  
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018  
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 9,  
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor  
9);

8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2018  
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun  
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Palu Tahun  
2018 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN  
2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PALU TAHUN  
ANGGARAN 2018.**

## **Pasal 1**

Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan untuk menjalani ketersediaan alokasi anggaran akibat pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan kegiatan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakan:
  - a. belanja tidak terduga;
  - b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - c. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam:
  - a. DPPA-Perangkat Daerah untuk program kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
  - b. RKA-Perangkat Daerah untuk program dan kegiatan yang belum tersedia.
- (3) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

### **Pasal 4**

Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.338.505.391.883,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp.1.338.505.391.883,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp 1.338.505.391.883,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. \_\_\_\_\_ 0,00

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan Rp. 1.338.505.391.883,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp	1.409.741.458.899,28	
2. Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Daerah			
Setelah Perubahan	Rp.	1.409.741.458.899,28	
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	97.039.433.016,28	
b) Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah			
Perubahan	Rp.	97.039.433.016,28	
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	25.803.366.000,00	
b) Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah			
Perubahan	Rp.	25.803.366.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto			
Setelah Perubahan	Rp.	71.236.067.016,28	
Sisa Lebih Pembiayaan			
Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00	

#### **Pasal 5**

Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terdapat kewajiban yang tidak dapat dibayarkan dalam Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018, maka menjadi

pembebanan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

Ringkasan perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 8**

Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada  
tanggal 9 November 2018

**WALI KOTA PALU,**

ttd

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu pada  
tanggal 9 November 2018

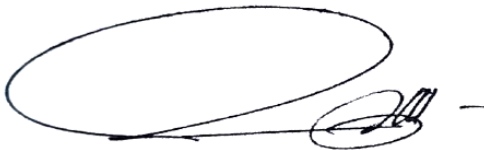
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



ROMY SANDI AGUNG  
NIP.19740227 199903 1 004